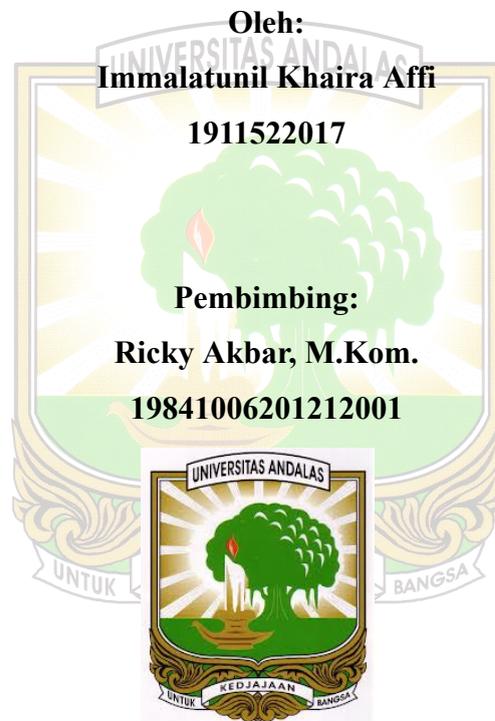


**PENERAPAN METODE *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS* (AHP)
PADA PEMBANGUNAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PEMILIHAN PENERIMA HAK ASUH ANAK
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA DEPOK)**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Strata-1
pada Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Andalas



**DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

ABSTRAK

Pengadilan Agama merupakan suatu entitas yang diperuntukkan bagi umat Islam untuk mencari keadilan dan menyelesaikan masalah hukum melalui sistem peradilan yang sesuai dengan hukum Islam. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama yaitu penyelesaian perkara penetapan penerima hak asuh anak (Hadhanah). Objek kajian pada penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Depok yang terletak di Jl. Boulevard Raya Kota Kembang, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Objek kajian diambil dengan latar belakang Jawa Barat sebagai provinsi yang menjadi penyumbang angka perceraian tertinggi di Indonesia, dimana tingkat perceraian yang tinggi akan berdampak pada jumlah kasus Hadhanah yang lebih banyak. Proses penyelesaian perkara penerima hak asuh anak pada Pengadilan Agama Kota Depok sendiri dapat berminggu-minggu lamanya. Permasalahan pengambilan keputusan dengan metode manual timbul ketika alternatif memiliki value yang hampir sama. Oleh karena itu perlu ditentukan bobot prioritas untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu sistem pendukung keputusan pemilihan penerima hak asuh anak dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam menentukan prioritas dari alternatif. Berdasarkan studi literatur dan hasil wawancara dengan Pakar yang merupakan Hakim pada Pengadilan Agama Kota Depok ditetapkan kriteria yang digunakan antara lain adalah berakal sehat, kemampuan mengasuh dan mendidik anak, kesehatan fisik, kualitas keberagamaan, berbudi, menetap bersama anak, kemampuan membiayai, karakteristik lingkungan dan status pernikahan. Pada penelitian ini terdapat empat alternatif yang digunakan, yaitu penggugat, tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3. Diharapkan pengimplementasian sistem pendukung keputusan dengan metode AHP ini dapat membantu pengambilan keputusan penerima hak asuh anak di Pengadilan Agama Kota Depok.

Kata Kunci: SPK, Pengadilan Agama, Hadhanah, Hak Asuh Anak, AHP